

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik**



**OLEH:
ARMELINDA JULITA RODOLOF
2016210030**

**KOSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2020**

RINGKASAN

Pemerintah Desa berkewajiban buat mengelola kemampuan desa dalam rangka pencapaian tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi desa, dengan tujuan buat tingkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan serta keadilan, demokrasi serta penghormatan terhadap budaya lokal, mencermati kemampuan serta keanekaragaman wilayah. Ada pula yang jadi posisi riset ialah di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Hasil riset yang dicoba oleh periset, kalau kedudukan pemerintah Desa Selorejo dalam pengelolaan desa wisata buat mewujudkan kesejahteraan warga Desa Selorejo ialah dengan membentuk suatu Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan(LKDPH) yang ialah wadah pemberdayaan warga dibidang pariwisata pedesaan, setelah itu pemerintah Desa Selorejo pula melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan desa wisata yang dikelolah oleh Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH) dan dicoba penilaian tiap 6 bulan, tidak hanya itu pemerintah desa memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam pengoptimalan pengelolaan desa wisata serta pula pemerintah desa melaksanakan sosialisasi terpaut standar operasional pengelolaan desa wisata, serta diadakan pelatihan terpaut pengelolaan wisata. Ada pula yang jadi aspek pendukung dalam pengelolaan Desa Wisata Selorejo ialah:(1) posisi wisata yang strategis;(2) partisipasi warga Desa Selorejo;(3) ketersediaan sumber energi alam yang mencukupi serta sangat potensial buat dijadikan posisi wisata;(4) terdapatnya kerjasama dengan BUMN(tubuh usaha kepunyaan negeri) serta pula pihak swasta. sebaliknya yang jadi aspek penghambat dalam pengelolaan Desa Wisata Selorejo ialah:(1) musibah alam semacam banjir serta longsor;(2) akses jalur mengarah spot wisata yang belum mencukupi;(3) hasil panen menyusut bila kerap turun hujan;(4) pendanaan dalam pengembangan desa wisata yang belum mencukupi.

Kata Kunci: Kedudukan, Pemerintah Desa, Kesejahteraan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata ialah salah satu zona yang sepanjang ini masih termarjinalkan selaku zona sampingan, sehingga belum sanggup berikan donasi berarti. Sebaliknya sumberdaya sudah ada melimpah buat menunjang pengembangannya., tinggal gimana strategi pengelolaannya. Pariwisata ialah zona yang bisa membagikan peranan besar untuk pembangunan sesuatu wilayah sekalian membagikan donasi untuk perolehan devisa ataupun penciptaan peluang kerja. Memandang peranan serta donasi yang begitu besar hingga kekayaan pariwisata butuh dibesarkan secara berkepanjangan. Pengembangan pariwisata wajib senantiasa mengedepankan faktor lokalitas warga tempatan yang terdapat. Sehingga konsep pengembangan pariwisata ialah konsep kesisteman yang utuh, terintegrasi, serta bertabiat multi zona(Itah Masitah: 2019).

Pembangunan pariwisata pada hakikatnya ialah upaya buat meningkatkan serta menggunakan objek wisata serta energi tarik wisata yang terwujud dalam wujud keelokan alam, keragaman flora serta fauna, tradisi serta budaya dan aset sejarah serta purbakala. Pariwisata berbasis warga selaku suatu pendekatan pemberdayaan yang mengaitkan serta meletakkan warga selaku pelakon berarti dalam konteks paradigma baru pembangunan ialah pembangunan yang berkepanjangan. Pariwisata berbasis warga merupakan dimana warga ataupun masyarakat setempat memainkan peranan berarti serta utama dalam pengambilan keputusan pengaruhi serta berikan khasiat terhadap kehidupan serta area mereka, Ali Aziz, dkk(2018).

Pariwisata berbasis warga ialah kesempatan buat menggerakkan segenap kemampuan serta dinamika warga, guna mengimbangi kedudukan pelakon usaha pariwisata skala besar. Pariwisata berbasis warga tidak berarti ialah upaya kecil serta lokal semata, namun butuh diletakkan dalam konteks kerjasama warga secara global. Tantangan buat mewujudkan pariwisata yang berbasis warga merupakan yang sangat sangat dicoba oleh orang buat melaksanakan pengelolaan pada wisata tersebut. Desa wisata kawasan pedesaan yang memiliki ciri tertentu yang setelah itu dikemas secara apik buat menarik atensi wisatawan. Ciri tersebut jadi tujuan dari menarik atensi wisatawan itu sendiri.

Dalam Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mengangkut Kembali otonomi desa berbasis jati diri desa, mengakomodasi keanekaragaman serta keunikan budaya masing- masing desa, didalam suatu negeri kesatuan Republik Indonesia. Undang- Undang 6 tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad negeri buat mengotomikan desa, dengan bermacam kemandirian pemerintahan desa semacam pemilihan universal calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam DPRD desa, serta kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, menimbulkan wilayah otonomi NKRI jadi provinsi, kabupaten ataupun kota, serta desa. Reformasi sudah menggapai akarnya, pemahaman konstitusi desa serta dusun diramalkan hendak mendesak proses reformasi

berbasis otonomi wilayah bertabiat hakiki. Undang- undang Nomor 6. tahun 2014, pasal 1 kalau Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepentingan warga setempat dalam sistem pemerintahan Negeri Kesatuan Republik Indonesia.

Bersumber pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 15, Pemerintah Desa berkewajiban buat mengelola kemampuan desa dalam rangka pencapaian tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi desa, tujuan itu antara lain: kenaikan kesejahteraan rakyat, pemerataan serta keadilan, demokrasi serta penghormatan terhadap budaya lokal, mencermati kemampuan serta keanekaragaman wilayah. Tujuan dari kedudukan pemerintah desa dalam memaksimalkan kemampuan yang dipunyai daerahnya ialah buat tingkatkan pemasukan warga, pemasukan wilayah serta pemasukan negeri dan penerimaan devisa, sekalian selaku upaya buat membuka lapangan kerja untuk warga setempat. Dalam memaksimalkan kemampuan yang terdapat disuatu wilayah pastinya pula butuh sokongan serta kedudukan dan yang aktif dari warga setempat, sebab yang sangat merasakan akibat dari terdapatnya upaya tersebut yakni warga itu sendiri.

Sehingga bersumber pada penjelasan tersebut diatas, periset tertarik buat melaksanakan riset dengan judul:“ **KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA BUAT TINGKATKAN KESEJAHTERAAN WARGA(RISET DI DESA SELOREJO, KECAMATAN DAU, KABUPATEN MALANG)**“

1.1 2 Rumusan Masalah

1. Gimana Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Desa Wisata buat tingkatkan kesejahteraan warga?
2. Apa saja aspek pendukung serta penghambat kedudukan pemerintah desa dalam pengelolaan desa wisata buat tingkatkan kesejahteraan warga?

1.1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber pada latar balik serta rumusan permasalahan yang sudah dijabarkan tadinya, hingga penelitan ini memiliki tujuan selaku berikut:

1. Buat mengenali Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Desa Wisata buat tingkatkan kesejahteraan warga.
2. Buat mengenali aspek pendukung serta penghambat Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Desa Wisata buat tingkatkan kesejahteraan warga?

1. 4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana mestinya, sesi aktivitas pastinya memiliki mafaat- mafaat tertentu yang mau diperoleh cocok dengan kemauan. Demikian pula perihal aktivitas riset ini diharapkan bisa membagikan sumbangan pemikiran dalam memperluas khasanah pengetahuan secara:

1. Teoritis

Hasil riset ini, diharapkan bisa menaikkan khasanah ilmu dan pengetahuan di bidang ilmu Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Desa Wisata dalam tingkatkan kesejahteraan masyarakat

2. Praktis

Hasil riset ini, diharapkan bisa membagikan informasi serta masukan untuk warga. Riset ini bermanfaat secara teknis buat membetulkan, tingkatkan serta mencari pemecahan dalam membongkar kasus Kedudukan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Desa Wisata

DAFTAR PUSTAKA

- Ahkam B. Saeful, dkk. 2018. *Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Desa Wisata. Vol. 3 No. 2.* Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Citra D. Lestari, Ya'Taufiq Kurrahman. 2019. *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Wisata Hutan Pinus Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Volume 9 Nomor 2.* Reformasi: Malang
- Jamaludin, Adonasrullah.2016. *Sosiologi Pedesaan.* Andung: CV PUSTAKA SETIA
- Jimu, M.I. 2008. *Community Development.* Community Development:A Cross-Examination of Theory and Practice Using Experiences in Rural Malawi. *Africa Development, Vol. XXXIII, No. 2, 2008, pp. 23-3*
- Mubarak, Z. 2010. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan Tesis.* Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah Dan Kota. Undip. Semarang.
- Masitah, Itah. 2019. *Pengembangan Desa Wisata Oleh Pemerintah Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Volume 6 Nomor 3.* Universitas Galuh: Jawa Barat
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* Jakarta: Penerbit Erlangga
- Pemendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOT) Pemerintah desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Priasukmana Soetarso dan R. Mohamad Mulyadin, 2013, *Pembangunan Desa Wisata : Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah,* Info sosial Ekonomi
- Soemarno. 2014. *Desa Wisata.* Malang: PP SUB
- Sugiyono.(2017) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta
- Suharto,E.2005.*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial.* Bandung: PT Refika Aditama
- Suwantoro,Gamal. 2014. *Dasar- Dasar Pariwisata.* Yogyakarta: Andi
- Sukmaniar. 2007. *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (Ppk) Pasca Tsunami Dikecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Tesis.* UNDIP. Semarang.

Undang-undang No. 32 TAHUN 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Widjaja, Haw. 202. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT. Raja grafindo
Persada.